

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pertumbuhan ekonomi merupakan masalah perekonomian suatu negara dalam jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu indikator penting dalam melakukan analisis tentang pembangunan ekonomi yang terjadi pada suatu negara ataupun daerah. Pertumbuhan ekonomi yang meningkat dan distribusi pendapatan yang merata sangat dibutuhkan demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pertumbuhan ekonomi daerah merupakan integral dari pertumbuhan ekonomi secara nasional yang pelaksanaannya berdasarkan prinsip otonomi daerah dengan mendayagunakan sumber daya yang dimiliki. Menurut Djohadikusumo, pengertian pertumbuhan ekonomi adalah ilmu yang mempelajari proses peningkatan produksi barang dan jasa dalam kegiatan ekonomi masyarakat.¹ Dalam hal ini, pertumbuhan ekonomi daerah dilihat dengan angka Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

Dalam era otonomi daerah seperti sekarang ini, masing-masing daerah akan berlomba dan berusaha untuk meningkatkan pertumbuhannya agar dapat meningkatkan taraf hidup masyarakatnya. Oleh karena itu, pemerintah beserta swasta harus secara bersama-sama dalam menggunakan sumber daya yang ada dan harus mampu menaksir potensi sumber daya yang diperlukan untuk

¹ Rudi Badrudin, *Ekonomika Otonomi Daerah* (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2012), p.113

merancang dan membangun perekonomian. Ini sejalan dengan Undang-Undang No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, yang pada dasarnya memberikan keleluasaan kepada masing-masing daerah dalam menentukan arah pembangunannya.

Perlu dilakukan analisis mengenai karakteristik dari faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi daerah serta sektor yang potensial yang ada di wilayah tersebut secara berkelanjutan agar pertumbuhan ekonomi terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, sebab untuk mencapai kepada tujuan tersebut masih banyak kendala yang harus dihadapi baik internal maupun eksternal. Kendala internal yang mempengaruhi biasanya adalah Sumber Daya Manusia (SDM) dan keadaan geografi wilayah (Sumber Daya Alam), sedangkan kendala eksternal berasal dari situasi dan kondisi perekonomian, politik, keamanan nasional dan global terhadap kinerja perekonomian daerah.

Tabel I.1
Peranan Wilayah/ Pulau dalam Pembentukan PDB Nasional
(dalam persen)

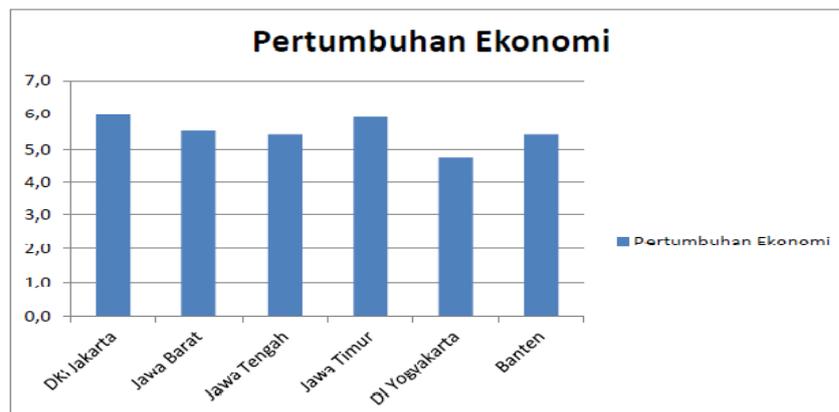
Wilayah/ Pulau	2010	2011	2012	Triwulan IV	
				2011	2012
Sumatra	23,12	23,56	23,77	23,64	23,91
Jawa	58,06	57,59	57,63	57,38	57,51
Bali dan Nusa Tenggara	2,73	2,56	2,51	2,58	2,55
Kalimantan	9,15	9,55	9,3	9,78	9,03
Sulawesi	4,52	4,61	4,73	4,65	4,86
Maluku dan Papua	2,42	2,13	2,06	1,97	2,14
Indonesia	100	100	100	100	100

Sumber: Badan Pusat Statistik².

Pertumbuhan ekonomi daerah di Indonesia sangatlah bervariasi, dari Tabel 1.1 tersebut, terlihat bahwa pembentukan PDB Indonesia sampai dengan triwulan

² Badan Pusat Statistik, *Berita Resmi Statistik Kabupaten Bekasi*, BPS No.14/02/Th.XVI 5 Februari 2013

IV tahun 2012 secara parsial masih didominasi oleh Pulau Jawa yaitu sebesar 57,51 persen dengan sumbangan yang berasal dari tiga provinsi terbesarnya yaitu DKI Jakarta (16,76 persen), Jawa Timur (14,89 persen) dan Jawa Barat (13,91 persen). Daerah-daerah yang memiliki pertumbuhan ekonomi yang tinggi tersebut merupakan pusat industri dan kegiatan ekonomi. Berikut adalah rincian rata-rata pertumbuhan ekonomi pada setiap provinsi di Pulau Jawa tahun 2001 sampai 2011.



Gambar I.1
Rata-Rata Pertumbuhan Ekonomi di Pulau Jawa
Tahun 2001-2011

Sumber : BPS (Data Diolah)

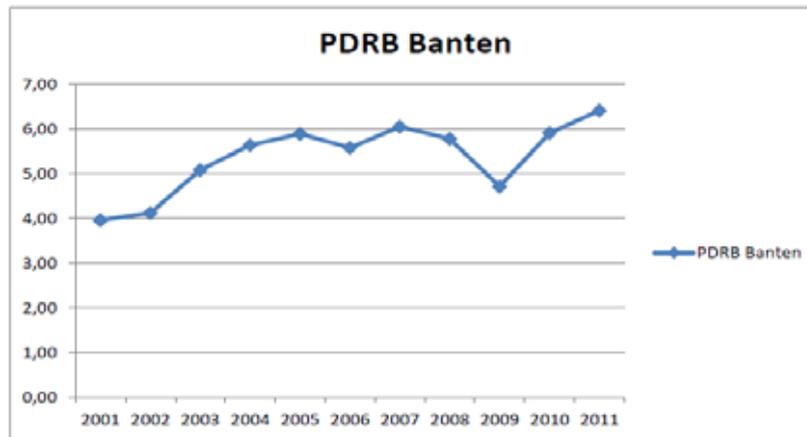
Grafik diatas menunjukkan bahwa provinsi di Pulau Jawa yang memiliki rata-rata pertumbuhan ekonomi daerah tertinggi selama 11 tahun terakhir adalah Provinsi DKI Jakarta yaitu sebesar 6%, kemudian Provinsi Jawa Timur sebesar 5,9%, Provinsi Jawa Barat dengan 5,5%, Jawa Tengah 5,4%, Banten 5,4% dan DI Yogyakarta sebesar 4,7%. Provinsi DKI Jakarta memiliki pertumbuhan tertinggi

di Pulau Jawa, ini dikarenakan DKI Jakarta sebagai pusat pemerintahan juga merupakan pusat kegiatan ekonomi seperti bisnis, perdagangan, investasi dan aktivitas ekonomi lainnya. Hal tersebut juga mendorong pertumbuhan atau perkembangan daerah pada daerah-daerah disekitar Jakarta yaitu Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi.

Melihat kondisi pertumbuhan ekonomi di Pulau Jawa yang cukup baik, terdapat satu Provinsi yang terbilang sebagai Provinsi baru yang merupakan hasil pemekaran dari Provinsi Jawa Barat pada tahun 2000, yang ditandai dengan dikeluarkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2000 serta menjadi Provinsi ke-28 di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yaitu Provinsi Banten. Provinsi Banten memiliki delapan daerah kabupaten/kota yaitu terdiri dari empat daerah kota dan empat daerah kabupaten.

Daerah kabupaten di Provinsi Banten antara lain adalah Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Tangerang, Kabupaten Serang, dan Kabupaten Lebak. Sedangkan yang termasuk daerah kota yaitu Kota Serang, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, dan Kota Cilegon. Dengan beberapa keunggulan yang dimiliki yaitu antara lain berada pada letak yang strategis dimana berbatasan langsung dengan dua Provinsi yang memberikan andil paling besar bagi pembentukan Produk Domestik Bruto Indonesia yaitu Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Jawa Barat, Provinsi Banten juga merupakan gerbang arus pergerakan manusia, barang dan jasa antar Pulau Jawa dan Sumatra, serta simpul perdagangan antarwilayah dan terletak pada bagian Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) dan penerbangan baik nasional maupun internasional, diharapkan pertumbuhan ekonomi Provinsi

Banten mampu bersaing dan bergerak cepat. Namun pada kenyataannya pertumbuhan ekonomi Provinsi Banten masih terlihat fluktuatif. Kondisi pertumbuhan ekonomi Provinsi Banten dapat dilihat dari Grafik berikut:



Gambar I.2

Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Banten Tahun 2001-2011

Sumber : BPS (Data Diolah)

Grafik diatas menggambarkan laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Banten yang selama lima tahun awal, terhitung dari tahun 2001, mengalami kondisi peningkatan meskipun pada tahun-tahun berikutnya mengalami fluktuatif. Krisis keuangan global pada periode tahun 2008-2009 berdampak pada pertumbuhan ekonomi Banten. Pada tahun tersebut (2008 dan 2009), kondisi ekonomi cenderung menurun dan berada pada kisaran angka 5,77% dan 4,69%. Pasca krisis keuangan global tahun 2008 dan 2009, pertumbuhan ekonomi nasional yang membaik berdampak pula pada peningkatan ekonomi beberapa daerah di Indonesia khususnya Provinsi Banten. Pertumbuhan ekonomi yang terjadi pada

Provinsi Banten tentunya dikarenakan pertumbuhan ekonomi yang terjadi pada masing-masing daerah kota/kabupatennya.



Gambar I.3

**Peranan Kabupaten/Kota dalam Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Banten
Tahun 2011 (dalam persen)**

Sumber : BPS (Data Diolah)

Menurut publikasi dari Berita Resmi Statistik Provinsi Banten, bila dilihat secara *quarter to quarter*, pertumbuhan ekonomi Provinsi Banten pada Triwulan III tahun 2013 menunjukkan pertumbuhan sebesar 2,12 persen, melambat dibandingkan dengan triwulan II-2013 yang besarnya 2,15 persen. Semua sektor mengalami pertumbuhan positif dimana pertumbuhan tertinggi terjadi pada sektor pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan sebesar 7,27 persen diikuti oleh sektor pengangkutan dan komunikasi 2,93 persen.

Secara *year on year*, pertumbuhan ekonomi Provinsi Banten pada triwulan III tahun 2013 mencapai 5,70 persen, lebih rendah dari pertumbuhan pada triwulan sebelumnya yang terkoreksi 5,87 persen. Nilai PDRB Banten atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan mengalami peningkatan, untuk

PDRB atas dasar harga konstan triwulan III tahun 2013 mencapai Rp 26,88 triliun atau bertambah Rp 557,55 miliar pada periode yang sama.³ Namun beberapa sektor memiliki pertumbuhan yang masih fluktuatif. Kondisi pertumbuhan ini tidak dapat dipastikan akan mengalami kenaikan jika pemerintah daerah tidak cepat dalam mengambil langkah atau strategi baru dalam mengupayakan sektor-sektor ekonomi yang terdapat di Provinsi Banten.

Pertumbuhan ekonomi selalu erat kaitannya dengan kapasitas produksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian. Berkaitan dengan hal tersebut, pertumbuhan ekonomi membutuhkan penyediaan atas pengalokasian sumber-sumber produksi untuk ditujukan pada proses produksi barang-barang modal yang tidak dipakai untuk konsumsi langsung tetapi akan digunakan untuk proses produksi selanjutnya guna menghasilkan barang dan jasa. Dengan demikian perlu tersedia modal atau dana pembiayaan salah satunya adalah investasi. Investasi adalah penanaman uang atau modal dengan tujuan mendapatkan keuntungan dari usaha tersebut. Menurut Kantonegoro, yang dikutip oleh Elyani dalam jurnalnya, investasi merupakan setiap wahana dimana dana ditempatkan dengan harapan untuk dapat memelihara atau menaikkan nilai atau memberikan hasil yang positif.⁴

Investasi yang terjadi di suatu daerah terdiri dari investasi pemerintah dan investasi swasta. Investasi dari sektor swasta dapat berasal dari investor-investor domestik maupun dari luar negeri (asing) sedangkan investasi pemerintah berasal dari anggaran belanja pemerintah guna menyediakan barang publik yang

³ Berita Resmi Statistik Provinsi Banten No.52/11/36/Th.VII,6 November 2013

⁴ Elyani. "Faktor yang Mempengaruhi Penanaman Modal Asing Berinvestasi di Indonesia", Jurnal Ilmiah Abdi Ilmu. Vol. 3 No.1 April 2010. P. 42

besarannya dapat dihitung dari selisih antara total anggaran pemerintah dengan belanja rutinnya.

Pertumbuhan suatu perekonomian tidak bisa lepas dari peran pemerintah. Menurut Todaro (2000), pemerintah harus diakui dan dipercaya untuk memikul peranan lebih besar dan lebih menentukan dalam upaya pengelolaan perekonomian nasional atau daerah.⁵ Banyaknya kawasan industri di Provinsi Banten perlu ditopang oleh permodalan yang cukup untuk pelaksanaan kegiatannya. Permodalan yang diperlukan untuk mencapai pertumbuhan *output* suatu daerah tidak bisa terlepas dari besaran pengeluaran pemerintah khususnya di sektor layanan publik dalam hal ini disebut sebagai investasi pemerintah.

Pengeluaran pemerintah daerah diukur dari total belanja rutin dan belanja pembangunan yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Semakin besar pengeluaran yang ditunjukkan untuk kegiatan yang produktif, maka semakin besar pula peluang terjadinya peningkatan perekonomian suatu daerah. Pengeluaran pemerintah salah satunya dalam bentuk belanja modal yang merupakan sumber pembiayaan pembangunan infrastruktur dan penambahan aset daerah untuk pelaksanaan proyek-proyek pembangunan yang dapat menunjang kelancaran usaha swasta dan pemenuhan pelayanan masyarakat serta demi terciptanya iklim investasi yang sangat dibutuhkan sebagai permodalan dalam pertumbuhan ekonomi kian hari semakin merosot.

Menurut Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UK4P)/ Ketua TEPPA, Kuntoro Mangkusubroto, menyatakan

⁵ Michael P. Todaro dan Stephen C. Smith, *Pembangunan Ekonomi Edisi ke-9*, (Jakarta: Erlangga, 2006), p.130

bahwa realisasi belanja 33 Provinsi per 30 Juni 2013 atau semester pertama tahun anggaran 2013 tidak mencapai target, Provinsi Banten merupakan satu dari 4 Provinsi yang memiliki realisasi belanja terendah yaitu sebesar 26,72 persen.⁶

Berdasarkan laporan Statistik Daerah Provinsi Banten 2013, realisasi belanja daerah Provinsi Banten selama periode 2010-2013 menunjukkan perkembangan yang kurang menggembirakan. Level belanja daerah Banten memang meningkat pesat, yaitu dari 2,84 triliun rupiah pada tahun 2010 menjadi 5,32 triliun rupiah pada tahun 2012 atau rata-rata tumbuh 36,96 persen per tahun. Namun belanja modal yaitu komponen belanja daerah yang paling berperan dalam memacu pertumbuhan ekonomi, pada periode yang sama hanya tumbuh rata-rata 5,36 persen per tahun. Padahal belanja barang dan jasa serta belanja pegawai masing-masing tumbuh 18,44 persen dan 26,42 persen per tahun.

Tabel 1.2

Realisasi Anggaran Belanja Provinsi Banten, 2010-2012 (miliar rupiah)

No	Jenis Belanja	2010	2011	2012
1.	Belanja Langsung	1.530	1.820	2.017
	1. Belanja Pegawai	108	130	148
	2. Belanja Barang & Jasa	595	973	951
	3. Belanja Modal	827	717	918
2	Belanja Tidak Langsung	1.305	2.081	3.301
	1. Belanja Pegawai	280	320	385
	2. Belanja Lainnya	1.025	1.761	2.916
Jumlah		2.835	3.901	5.318

Sumber: Statistik Daerah Provinsi Banten 2013⁷ (diolah).

Menurut Deddy Rustiono (2008), proporsi realisasi belanja publik yang lebih kecil dibandingkan dengan realisasi belanja aparatur daerah menunjukkan bahwa alokasi anggaran sebagian besar digunakan untuk kepentingan konsumtif,

⁶ <http://www.pikiran-rakyat.com/node/248148> diakses 1 November 2013

⁷ Statistik Daerah Provinsi Banten 2013, BPS Provinsi Banten

keadaan ini menunjukkan realisasi anggaran belanja daerah yang tinggi belum tentu mampu mendorong tingkat pertumbuhan ekonomi.⁸

Menurut Situs Pemetaan Potensi Ekonomi Daerah Koridor Wilayah Jawa yang dikelola oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Provinsi Banten merupakan gerbang investasi di Indonesia baik skala nasional maupun internasional. Provinsi Banten merupakan urutan ke-4 investasi asing se-Indonesia dengan aset investasi tersebar di 19 kawasan industri dengan 30 negara yang telah berinvestasi.

Tabel 1.3
Jumlah dan Nilai Proyek Realisasi Penanaman Modal Asing

Tahun	Jumlah Proyek	Realisasi Investasi		Penyerapan Tenaga Kerja	
		juta rupiah	ribu US\$	Asing	Indonesia
2008	110	2655235,41	197920,61	-	36051
2009	68	1700618,16	310895,82	-	13043
2010	61	3160399,29	226316,19	-	13260
2011	56	754119,21	9440771,08		9131

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Banten

Kondisi penanaman modal yang berasal dari sektor swasta di Provinsi Banten secara umum lebih banyak dari sektor industri pertanian. Berdasarkan laporan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mengenai Potensi Investasi Provinsi Banten, sektor penanaman modal, sektor usaha masih terkonsentrasi pada sektor usaha perdagangan dan reparasi, industri logam dasar, barang dari logam, mesin dan elektronika (17,01%), industri karet, barang dari karet dan plastik (9,96%), industri kimia dasar, barang kimia, dan farmasi (9,96%), dan industri tekstil (7,47%). Minat usaha melalui PMA dalam mendorong mengembangkan

⁸ Deddy Rustiono, "Analisis Pengaruh Investasi, Tenaga Kerja, dan Pengeluaran Pemerintah terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Propinsi Jawa Tengah", Universitas Diponegoro Semarang 2008

usaha berbasis sumberdaya lokal atau yang menyentuh sektor - sektor ekonomi yang menjadi mata pencaharian utama masyarakat (pertanian) sudah mulai tumbuh namun dalam kapasitas yang masih relatif kecil, antara lain diperlihatkan dengan adanya persetujuan proyek PMA pada sektor usaha pertanian hortikultura, sayuran dan bunga (1 proyek), industri pengolahan, pengawetan buah - buahan dan sayuran (1 proyek) serta industri tepung dan pati (1 proyek).⁹ Dapat disimpulkan sektor agraris merupakan sektor yang menjadi bagian yang diandalkan dalam pengembangan investasi Propinsi Banten.

Provinsi Banten menjadi tujuan investasi yang menarik karena memiliki infrastruktur pendukung yang baik seperti akses jalan tol dari Jakarta-Tangerang-Merak, akses jalan Arteri Primer (Jalan Nasional) di seluruh wilayah, akses kereta api Jakarta-Rangkasbitung-Merak, akses penerbangan internasional (Bandara Soekarno Hatta, akses pelabuhan penyebrangan kapal Ferry Ro-Ro (ASDP Merak), Pelabuhan petikemas standar internasional (Pelabuhan Ciwandan), pelabuhan Curah standar internasional dan dermaga untuk kepentingan sendiri, tersedianya PLTU Suralaya, Bojonegara dan Captive Power (KDL, Tifico, Indah Kita, Nicomas, Chandra Asri, jaringan komunikasi tetap seluler, suplai air baku untuk industri dan rumah tangga dan terdapat jalur pipa gas dari Sumatera Selatan ke Bojonegara Banten. Kemudian terdapat pula beberapa proyek yang diprioritaskan menjadi tujuan investasi utama di Provinsi Banten antara lain adalah pembangunan Jembatan Selat Sunda yang menjadi penghubung antara Pulau Sumatera dan Pulau Jawa dan pembangunan jalan tol Serpong-Balaraja.

⁹ Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), <http://regionalinvestment.bkpm.go.id/newsipid/id/userfiles/ppi/Potensi%20Investasi%20Provinsi%20Banten%202012.pdf> (Diakses Tanggal 31 Oktober 2013)

Perlu diperhatikan dalam investasi swasta biasanya tidak hanya dibutuhkan sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan investasi, namun dibutuhkan pula iklim usaha yang bersahabat dari daerah yang ingin ditanamkan modalnya, hal tersebut sangat erat kaitannya dengan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah daerah. Menurut Humas Protokol Provinsi Banten, ada beberapa investor yang mengeluh karena tuntutan upah yang tinggi namun belum disertai dengan produktivitas yang sesuai. Indikasinya terlihat ketika beberapa perusahaan memindahkan basis produksi ke daerah lain maka itu merupakan tanda suatu masalah.¹⁰ Ada beberapa proyek investasi bermasalah di Provinsi Banten, diantaranya yaitu pada Februari 2011, PT. Tirta Investama pemegang merk Aqua Danone membatalkan eksploitasi Air di Kecamatan Padarincang, Kabupaten Serang, Banten.

Terjadi pembatalan pembangunan pabrik semen terbesar se-Asia Tenggara di Kabupaten Lebak pada bulan Maret 2012. Selanjutnya terjadi perseteruan kepemilikan lahan PT. Krakatau Steel dengan Pemerintah Kota Cilegon juga sempat membuat pematangan lahan lokasi pabrik gabungan antara Krakatau Steel dengan Posco Korea Selatan terhambat. Selain itu pembangunan Pelabuhan Internasional Bojonegara di Kabupaten Serang terbengkalai, pembangunan PIB sudah berjalan bertahun-tahun dan sudah menelan anggaran sekitar 6,55 triliun dari APBD. Juga sempat tertundanya proyek jalan simpang susun (*interchange*) di Desa Julang, Kec Cikande, Kab Serang dimana pembiayaannya juga dari APBD. Berdasarkan hal diatas, daya saing Banten demi

¹⁰ <http://humasprotokol.bantenprov.go.id/banten-menuju-kedewasaan/> diakses 15Des2013

menarik investor perlu ditingkatkan khususnya dalam berbagai bidang termasuk perizinan, infrastruktur, energi dalam bidang *services* transportasi dan sebagainya.

Pemerintah daerah juga harus tetap memperhatikan dampak sosial dan lingkungan, sehingga aliran dana asing yang masuk harus sesuai dengan Izin Usaha Industri dan Rekomendasi Berita Acara Pemeriksaan Izin Usaha Industri yang diterbitkan oleh Badan Promosi dan Investasi Daerah (BPID) agar produsen dalam negeri khususnya tidak merasa dirugikan dan tetap terjaga eksistensinya. Kemajuan teknologi yang tercipta dari peningkatan investasi terkadang menjadi suatu ancaman bagi tenaga kerja, karena jika teknologi berkembang dengan pesat maka peran tenaga kerja yang tidak terampil bisa saja tergantikan oleh mesin-mesin canggih yang memiliki kinerja lebih maksimal.

Dari sisi lainnya, menurut Samuelson dan Nourdhous (2004), salah satu faktor yang berpengaruh dalam pertumbuhan ekonomi adalah sumber daya manusia yang ada di suatu wilayah. Sehingga dengan kata lain penduduk merupakan salah satu faktor yang berperan penting dalam pertumbuhan ekonomi. Jumlah penduduk yang besar merupakan pasar yang potensial bagi pemasaran hasil-hasil produksi. Jumlah penduduk yang terus meningkat akan menyebabkan peningkatan permintaan dan penawaran akan barang dan jasa dalam kegiatan transaksi ekonomi.

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), Tenaga kerja dapat dikatakan sebagai seluruh penduduk dalam usia kerja berusia 15 tahun ke atas yang sedang bekerja, yang memiliki pekerjaan namun sementara tidak bekerja, seseorang yang tidak

memiliki pekerjaan dan sedang mencari pekerjaan dikategorikan bekerja.¹¹ Secara singkat dapat dikatakan bahwa tenaga kerja merupakan penduduk yang melakukan kegiatan produksi atau memiliki potensi memproduksi suatu barang atau jasa sebagai bentuk usaha untuk menghasilkan pendapatan.

Penduduk yang terus bertambah akan memperbesar jumlah tenaga kerja dan penambahan tersebut memungkinkan suatu daerah untuk menambah produksi. Namun disisi lain, akibat buruk dari penambahan penduduk yang tidak diimbangi dengan kesempatan kerja, akan menyebabkan pertumbuhan ekonomi tidak sejalan dengan peningkatan kesejahteraan. Kualitas dari penduduk suatu daerah juga dapat menentukan besarnya produktivitas yang dihasilkan oleh berbagai sektor perekonomian karena penduduk merupakan faktor yang menjalankan kegiatan produksi, atau dalam hal ini disebut tenaga kerja. Jika bicara mengenai penduduk, dalam hal ini sebagai tenaga kerja maka hal tersebut akan berkaitan erat dengan tingkat pendidikan masyarakat pada daerah tersebut.

Pada tahun 2012, Provinsi Banten memiliki jumlah angkatan kerja berjumlah 5.125.057 jiwa. Sedangkan yang bukan merupakan angkatan kerja sebesar 2.755.858 jiwa. Pada tahun 2011, jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja berdasarkan lapangan pekerjaan berjumlah 4,529.660 jiwa. Pada tahun 2011, sektor industri menjadi bagian yang menyerap tenaga kerja sebesar 1,140.427 jiwa. Berikut adalah kondisi angkatan kerja Propinsi Banten tahun 2012.

¹¹Badan Pusat Statistik (BPS), <http://www.bps.go.id/menutab.php?tab=6&ist=1&var=T> (Diakses Tanggal 30 Oktober 2013)

Tabel I.4
Kondisi Angkatan Kerja Kabupaten/Kota Propinsi Banten Tahun 2012

Kab/Kota	Angkatan Kerja		
	<i>Economically Active</i>		
Regency/Municipality	Bekerja	Pengangguran	Jumlah
	<i>Working</i>	<i>Unemployment</i>	<i>Total</i>
1. Pandeglang	517 943	53 131	571 074
2. Lebak	508 065	50 687	558 752
3. Tangerang	1 175 846	152 235	1 328 081
4. Serang	582 314	86 715	669 029
5. Kota Tangerang (Mun)	840 092	76 134	916 226
6. Kota Cilegon (Mun)	159 670	20 360	180 030
7. Kota Serang (Mun)	234 786	28 420	263 206
8. Kota Tangerang Selatan	587 131	51 528	638 659
Banten	4 605 847	519 210	5 125 057

Sumber : Badan Pusat Statistik (Diolah)

Tabel diatas menunjukkan kondisi tenaga kerja pada Kabupaten/Kota di Provinsi Banten satu tahun yang lalu yaitu pada tahun 2012. Dari data tersebut dapat dideskripsikan bahwa daerah yang memiliki jumlah angkatan kerja paling banyak di Provinsi Banten adalah Kabupaten Tangerang. Sekitar kurang lebih 26% dari keseluruhan penduduk yang bekerja yang berjumlah 4.605.847 jiwa terdapat 1.175.846 jiwa penduduk yang bekerja.

Jumlah pengangguran yang masih terjadi di Provinsi Banten disebabkan karena masih minimnya tingkat pendidikan serta ketrampilan yang dimiliki, padahal untuk dapat mengolah suatu sumber daya alam diperlukan tenaga kerja yang memiliki pendidikan dan ketrampilan cukup agar mampu mendayagunakan potensi alam dengan efektif sehingga tercapai tujuan pertumbuhan ekonomi.

Dari beberapa uraian tersebut, pertumbuhan ekonomi regional memiliki banyak faktor yang mempengaruhi. Berdasarkan data yang telah diungkapkan, dapat terlihat bahwa belanja pemerintah Provinsi Banten dalam penyediaan modal dan pembangunan infrastruktur masih minim, sehingga belum optimal dalam mendukung kemajuan pertumbuhan ekonomi. Beberapa investor juga masih belum mendapatkan kenyamanan dalam menanamkan modalnya, sehingga upaya menarik investor masih perlu ditingkatkan serta masih belum maksimalnya tenaga kerja (angkatan kerja yang bekerja) yang terserap dalam pasar tenaga kerja, karena kebanyakan dari angkatan kerja yang ada di Provinsi Banten merupakan tenaga kerja yang berkualitas rendah dalam hal pendidikan maupun *skill*. Maka kiranya perlu diteliti lebih mendalam mengenai pengaruh yang timbul dari investasi dan jumlah tenaga kerja yang bekerja terhadap pertumbuhan ekonomi.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, dapat diidentifikasi beberapa hal yang mempengaruhi masalah pertumbuhan regional yang ditunjukkan dengan nilai Produk Domestik Regional Bruto adalah sebagai berikut:

1. Apakah ada pengaruh kondisi geografis terhadap PDRB?
2. Apakah ada pengaruh pengeluaran pemerintah daerah terhadap PDRB?
3. Apakah ada pengaruh investasi terhadap PDRB?
4. Apakah ada pengaruh tenaga kerja yang bekerja terhadap PDRB?
5. Apakah ada pengaruh investasi dan tenaga kerja terhadap PDRB?

C. Pembatasan Masalah

Dari berbagai permasalahan yang telah diidentifikasi di atas, pertumbuhan ekonomi regional yang ditunjukkan dengan nilai PDRB dipengaruhi oleh banyak faktor yang sangat luas dan kompleks. Berhubung keterbatasan yang dimiliki, maka peneliti membatasi masalah yang akan diteliti yaitu “Pengaruh Investasi dan Tenaga Kerja terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten/Kota di Provinsi Banten”. Pembatasan ini dilakukan agar peneliti dapat lebih jelas dan terfokus dalam mengkaji serta menganalisis fakta dan temuan yang diperoleh.

D. Perumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah di atas, maka masalah perumusan pada penelitian ini adalah:

1. Apakah terdapat pengaruh antara investasi terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten/Kota di Provinsi Banten?
2. Apakah terdapat pengaruh antara tenaga kerja terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten/Kota di Provinsi Banten?
3. Apakah terdapat pengaruh antara investasi dan tenaga kerja terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten/Kota di Provinsi Banten?

E. Kegunaan Penelitian

Secara umum hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi semua pihak yang terkait baik secara teoretis maupun praktis.

1. Secara Teoretis

Penelitian ini dapat berguna bagi peneliti, mahasiswa lain dan masyarakat untuk menambah wawasan dan mengembangkan pengetahuan mengenai konsep investasi, tenaga kerja serta pengaruhnya terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

2. Secara Praktis

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan acuan untuk mengambil langkah-langkah yang efektif dan efisien dalam menghadapi permasalahan yang terkait dengan investasi, tenaga kerja terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) ataupun juga sebagai referensi dalam penyelesaian penelitian yang berkaitan dengan variabel tersebut selanjutnya.